

## Jawaban Kisi-Kisi Sejarah Indonesia

### BAHAN UJIAN SM 5 KLAS XII SEJARAH INDONESIA ( WAJIB) 2021/2023

#### Perjuangan Mempertahankan Diri dari Disintegrasi Bangsa

1. Latar belakang pemberontakan DI/TII sulawesi Selatan
2. Latar belakang pemberontakan DI/TII
3. Tujuan pemberontakan RMS
4. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz
5. Alasan Pemberontakan APRA
6. Cara pemerintah menangani pemberontakan
7. Dewan Jendral, Dokuman Gilchrist
8. Latar belakang pembentukan FDR oleh amir syarifudin
9. Bukti PRRI/Permesta mendapat dukungan USA
10. Pengertian RERA kabinat Hatta
11. Alasan PKI dilarang di Indonesia
12. Pembinaan Integrasi bangsa

#### Perjuangan Tokoh Nasional Dan Daerah

1. Perjuangan tokoh Hatta
2. Perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
3. Perjuangan Syarif Kasim II dlm mendukung pemerintah RI

#### Demokrasi Liberal

1. Kapan demokrasi Liberal berjalan
2. PM NATSIR
3. PM Ali Sastroamijoyo I
4. Pemilu 1 (1955)
5. Partai pemenang pemilu 1
6. Perdana Menteri Juanda
7. Penyebab Masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian PM
8. Tugas Konstituante mada Demokrasi Liberal
9. Sebab Jatuhnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo I
10. Latar belakang mosi tidak percaya thd Perdana Menteri Sukiman
11. Sistim Ekonomi gerakan benteng dan penciptanya

#### Demokrasi Terpimpin

1. Penyebab dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. Konsepsi Presiden 21 Februari 1957
3. Trikora
4. Isi Inti Dekrit Presidn 5 Juli 1959
5. Perbedaan pandangan Hatta dan Sukarno yg menyebabkan Hatta mundur sbg akil presiden
6. Manipol USDEK dan Penemuan Kembali Revolusi Kita
7. Penyebab Indonesia Keluar dari keanggotaan PBB (7 Januari 1965)
8. Kebijakan politik Luar negeri masa demokrasi terpimpin
9. Politik mercusuar

#### ORBA

1. Dewan Jendral >< Dean Revolusi
2. Tritura
3. Nawaaksara ditolak MPRS
4. Angkatan kelima
5. Tindakan Mayjen Suharto setelah menerima Supersemar
6. tiga orang utusan Mayjen Suharto untuk menerima Supersemar
7. Trilogi pembangunan ORBA
8. Azas Tunggal

## A. Perjuangan Mempertahankan diri Dari Disintegrasi Bangsa

1. latar belakang pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan adalah kekecewaan **Kahar Muzakar** karena pasukannya yang tergabung dalam Komando Griliya tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS).

Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan berlangsung pada 1950 hingga Februari 1965. Proses pemberontakan Kahar Muzakar dimulai setelah pasukannya ditolak ke dalam APRIS. Kahar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan. Dia menyatakan bahwa pasukannya menjadi bagian dari **NII Kartosuwiryo (FYI:Kartosuwiryo pelopor dan pemimpin DI/TII di Jawa Barat)**.

Penumpasan pasukan DI/TII Sulawesi Selatan dilakukan dengan penyerbuan oleh **pasukan Batalyon 330/Kujang Siliwangi**. Kahar Muzakar tewas tertembak dalam penggerebekan itu.

2. Latar belakang pemberontakan DI/TII

pemberontakan DI/TII di Jawa Barat merupakan pelopor gerakan ini. Pemimpinnya SM.Kartosuwiryo didaulat sebagai imam atau pemimpin tertinggi dari Negara Islam Indonesia. Kemudian, diakui oleh wilayah-wilayah pemberontakan lainnya.

### ➤ DI/TII Di Jawa Barat

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo (S. M. Kartosuwirjo). Latar belakang DI/TII di Jawa Barat adalah penandatanganan Perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosuwirjo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat.

Dia bersama kurang lebih 2 ribu orang pengikut yang terdiri dari laskar Hizbullah dan Sabilillah, menolak berpindah dan memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Proklamasi NII dilaksanakan pada 7 Agustus 1949.

Pemerintah RI mulanya berusaha menyelesaikan gerakan ini dengan cara damai melalui komite yang dipimpin Ketua Masyumi, Natsir. Sayangnya, komite itu tak berhasil merebut kembali Kartosuwirjo ke pelukan RI. Maka dari itu, pada 27 Agustus 1949, pemerintah RI memberlakukan penumpasan yang dinamakan Operasi Baratayudha.

### ➤ DI/TII Di Aceh

Peristiwa DI/TII di Aceh dilatarbelakangi ketidakpuasan rakyat Aceh atas keputusan pemerintah yang menjadikan Aceh satu karesidenan di bawah Sumatra Utara.

Ketidakpuasan ini menyangkut dengan otonomi daerah, pertentangan antargolongan, dan ketidaklancaran rehabilitasi serta modernisasi di Aceh. Pemberontakan pun ditandai dengan proklamasi Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwirjo pada 20 September 1953.

Pemerintah mengatasi pemberontakan tersebut secara damai, yaitu melalui memberikan pengertian kepada rakyat Aceh dan membujuk mereka supaya kembali kepada RI. Pertentangan ini pun luluh melalui musyawarah pada 26 Mei 1959 antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Hardi S. H., penguasa perang, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, T. Hamzah sebagai wakil pemerintah rakyat Aceh, dan pimpinan DI/TII yang diwakili Ayah Gani Usman.

Musyawarah tersebut menciptakan keputusan seperti memberikan status daerah istimewa untuk Aceh

➤ DI/TII Jawa Tengah

Latar Belakang awalnya sama dengan DI/TII Jawa Barat, tapi di Jawa Barat terlebih dahulu berdiri sehingga pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwiryo.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah ini berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga Juni 1954. Sedangkan proses pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah adalah mengikrarkan berdirinya DI/TII Jawa Tengah (Jateng) pada 23 Agustus 1949 di Desa Pengarasan, Tegal. Kemudian, perluasan pemberontakan di Kebumen oleh Kiai Moh. Mahfudz. Selain itu, Batalyon 426 Kudus dan Magelang bergabung dengan pasukan DI/TII Jateng. Pemberontakan DI/TII Jateng berhasil dihentikan dengan cara pembentukan komando operasi militer oleh pemerintah yang diberi nama Gerakan Benteng Nasional pada Januari 1950.

➤ DI/TII Kalsel

pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan (Kalsel) berlangsung pada 1950 hingga 1959. Keinginan untuk bergabung dengan NII bentukan Kartosuwiryo yang melatarbelakangi pemberontakan DI/TII Kalsel. Pemberontakan DI/TII Kalsel diawali dari deklarasi Ibnu Hajar pada Oktober 1950 bahwa DI/TII Kalsel merupakan bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Dia juga menamakan pasukannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT). Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi pembentukan Ibnu Hajar. Salah satunya cara persuasif, pemerintah menyarankan agar Ibnu Hajar menghentikan pemberontakannya. Namun, usaha pemerintah ini gagal. Lalu, operasi militer dilaksanakan pada 1959. Operasi ini berhasil menangkap Ibnu Hajar sekaligus menumpas DI/TII Kalsel.

3. Pemberontakan RMS dipelopori oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yaitu Dr. Soumokil. Adapun tujuan dari pemberontakan ini untuk memisahkan wilayah Maluku dari NIT serta RIS dan menggantikannya dengan mendirikan negara mandiri yang bernama Republik Maluku Selatan.

Latar belakang pemberontakan RMS adalah adanya konflik di antara dua kekuatan di Negara Indonesia Timur (NIT). Kemudian, pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis-kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka

Peristiwa RMS akan diselesaikan dengan beberapa cara. Pertama pemerintah Indonesia menyelesaikan dengan cara damai, yaitu mengirim delegasi ke Maluku

Selatan untuk melakukan perundingan. Langkah kedua memblokade daerah Maluku Selatan dan yang ketiga melakukan operasi militer ke daerah Maluku Selatan.

4. Ketika RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah Negara Bagian di dalamnya, sayangnya NIT baru mendapat kabar penyatuan pada 4 April 1950.

Hal ini menyebabkan Andi Azis dan mantan anggota KNIL menentang hal tersebut terutama rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI.

Jadi ada 2 latar belakang

1) latar belakang dari pemberontakan ini adalah penolakan Andi Azis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kala itu, Andi Azis merupakan golongan federalis yang menolak penyatuan tersebut.

2) pemberontakan Andi Azis dilatar belakangi oleh sikap Andi Azis yang menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan.

Andi Azis menuntut agar para pasukan APRIS bekas KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Waktu itu ia sangat menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang. Menurutny, Negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan.

Akibat tindakannya tersebut, pemerintah pusat segera mengirimkan pasukan untuk menangkap Andi Azis. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Kemudian pada bulan April 1950, Andi Azis menyerahkan diri kepada pemerintah RIS dan diadili di Yogyakarta.

5. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949. Seperti diketahui hasil dari KMB termasuk di antaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL (Koninklijk Leger) dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI . Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950.

penumpasan yang dilakukan oleh Raymond Westerling dalam gerakan APRA dapat dilakukan dengan: Melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari 1950, dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh APRIS.

6. Cara pemerintah menangani pemberontakan ada 2 yaitu

-Secara damai = diplomasi, konferensi ataupun perundingan

-Secara militer = invasi, penyerangan, penangkapan dan eksekusi

Contoh nya bisa dibaca di nomor 1-5 sudah saya kasih contoh penanganan pemerintahnya.

7. Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh dewan pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari angkatan bersenjata, 5 Oktober 1965. (Nanti jenderal-jenderal yang akan dibantai oleh PKI ketika G30SPKI). Namun sebenarnya dewan jenderal ini asli bernama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.

Dokumen Gilchrist adalah dokumen yang dibuat oleh dubes inggris, gilchrist yang ditemukan di rumah bill palmer, isinya berupa laporan tentang koordinasi antara Gilchrist dan Dubes Amerika mengenai rencana mereka berdua untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dengan bantuan our local army friends. Yang mana kata our local army friends ini oleh pki merujuk pada dewan jenderal.

Dewan Revolusi Indonesia adalah sebuah kelanjutan dari Gerakan 30 September pimpinan Letnan Kolonel Untung Syamsuri dkk. Dewan Revolusi Indonesia dilahirkan melalui Dekret yang dikeluarkan oleh Untung di RRI pada 1 Oktober 1965. (dewan revolusi adalah kelompok yang melakukan G30SPKI)

8. Latar belakang FDR dibentuk oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut: menuntut agar hasil perjanjian Renville dibatalkan, menuntut agar kabinet Hatta dibubarkan, menuntut presiden membentuk kabinet baru dengan mengikutsertakan PKI dan FDR. Awalnya, kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan karena kegagalannya dalam Perundingan Renville yang oleh kalangan Indonesia dianggap merugikan pihak Indonesia sendiri. Lalu pada Februari 1948 Amir membuat FDR untuk menggalang basis massa.

Dengan demikian, Amir Syarifuddin mendirikan FDR didasari sikap kecewanya terhadap kabinet Hatta. Pada awalnya, kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan karena kegagalannya dalam Perundingan Renville yang oleh kalangan Indonesia dianggap merugikan pihak Indonesia sendiri.

(FYI FDR kepanjangan dari Front Demokras Rakyat)

9. terkuaknya keterlibatan Amerika dalam pemberontakan PRRI di Sumatera dan pemberontakan Permesta di Sulawesi. Hal dibuktikan dengan tertembak jatuhnya pesawat B26 milik Amerika Serikat pada 18 Mei 1958, saat mereka menerbangkan pesawat tersebut di atas Pulau Ambon. Mereka berhasil ditembak dalam pertempuran sengit oleh Kapten Ignatius Dewanto yang menerbangkan pesawat Mustang. Kedua awak pesawat itu pun ditawan di Pulau Hatala, dekat Ambon.

Alasan Amerika : agar indonesia tidak jatuh ketangan blok komunis, dengan menggulingkan pemerintahan indoneisa.

10. Program RERA ini diprakarsai oleh Wakil Presiden Moh Hatta yang bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer pada saat itu. Selain itu, program RERA juga bertujuan untuk merekrut tentara profesional yang tidak hanya memiliki postur tubuh tertentu, melainkan juga kondisi fisik dan pengetahuan yang memadai.

Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi dengan drastis. Kemudian, para tenaga bekas Angkatan Perang ini dipekerjakan di bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

11. Merujuk pada konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah:

- Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; dan
- Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (“PKI”) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan

12. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

Contoh Integrasi Nasional

- Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ...
- Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia. ...
- Menghargai Berbagai Budaya di Indonesia

## **B. Perjuangan Tokoh Nasional dan Daerah**

1. Peran Moh.Hatta

1) Mohammad Hatta memiliki beberapa peranan didalam melakukan pertahanan dari kemerdekaan, yaitu : Melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia. Menjadi seorang pemimpin dari Putera, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Menjadi seorang anggota Panitia Sembilan yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta.

2) Drs. Mohammad Hatta. Mendampingi Ir. Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bersama Ir. Soekarno.

3) Peran Drs. Mohammad Hatta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yaitu bersama Ir. Soekarno menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus–2 November 1949. Pada tanggal 27 Desember 1945, menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Drs. Mohammad Hatta dipercaya mendampingi Ir. Soekarno menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia.

2. Peran Sultan Hamengku buwono IX

1) menyusun Serangan Umum 1 Maret 1949 menghadapi Agresi Militer Belanda.

2) Sultan Hamengku Buwono IX memimpin delegasi RI dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar.

3) Sultan Hamengku Buwono IX juga mengatur proses kembalinya Ibukota RIS ke Jakarta tahun 1949.

4) harta yang diberikan Sultan HB IX kepada Negara sebesar 6,5 juta Gulden saat masih awal kemerdekaan

5) ketika pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Jakarta mengalami keadaan yang tidak aman, Sultan siap menerima jika Ibukota dipindahkan di Yogyakarta

3. Dukungan Sultan Syarif Kasim II terhadap pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan cara menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Kasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga mengibarkan bendera Merah Putih di Istana Kesultanan Siak dan mengajak raja-raja di Sumatra Timur untuk turut memihak Republik Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan Sultan Syarif Kasim II aktif menyuplai bahan makanan dan kembali menyumbangkan hartanya untuk perjuangan pemerintah Indonesia di Yogyakarta.

### **C. Demokrasi Liberal**

1. Era Demokrasi Liberal (1950–1959) yang dikenal pula dengan Era Demokrasi Parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

#### **2. PM Natsir (masa Demokrasi Liberal)**

Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan Mosi Integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Mohammad Natsir sebagai perdana menteri pada 17 Agustus 1950. Diangkatnya Natsir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada 6 September 1950.

Pada masa Kabinet Natsir ini berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Permasalahan terkait Irian Barat juga masih terus berlangsung dan belum ditemukan solusinya. Sehingga parlemen Indonesia tidak percaya kepada kabinet ini, dan kemudian Kabinet Natsir dan PM Natsir itu sendiri mengundurkan diri.

3. Pada 1 Agustus 1953, Ali Sastroamidjojo dipercaya menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Indonesia. Ia memimpin kabinetnya sendiri yang bernama Kabinet Ali Sastroamidjojo I sejak 1953 hingga 1955. Setelah masa jabatannya berakhir pada 1955, Ali Sastroamidjojo kembali menjadi Perdana Menteri Indonesia untuk kedua kalinya pada 26 Maret 1956. Ia memimpin kembali kabinetnya, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo II hingga 14 Maret 1957.

#### **4. Pemilu tahun 1955**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara.

Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi, pada akhirnya, daerah ke-16 Indonesia yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu, daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Pemilu ini diadakan pada masa Ali Sastroamidjojo.

Pemilu ini diikuti 29 partai dan merebutkan 260 jumlah kursi DPR, dan 520 jumlah kursi konstituante, dengan ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

#### 5. Hasil Pemilu 1955

Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih

1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan	178.481	0,47	1



	Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro			
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Partai Persatuan Dayak (PPD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirosoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	–
Jumlah		37.785.299	100,00	257

6. Kabinet Djuanda merupakan kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Djuanda bertahan paling lama dibanding masa pemerintahan kabinet-kabinet lainnya, yaitu kurang lebih selama 14 bulan. Pergantian kabinet selama era demokrasi liberal memang kerap terjadi.

Kabinet Djuanda sendiri dikenal sebagai kabinet zaken, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada tiga kabinet yang merupakan kabinet zaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan tentu saja Kabinet Djuanda.

Dengan kata lain, masa pemerintahan Kabinet Djuanda merupakan penutup era demokrasi liberal sebelum dialihkan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959.

7. Alasan Kenapa Pada masa demokrasi liberal banyak terjadi perubahan PM

- Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)
- Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951-3 April 1952)
- Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
- Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957)
- Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959)

Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antargolongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai.

Selain itu juga pada masa ini masih banyak terjadi pemberontakan, sehingga banyak kinerja kabinet yang terlaksana secara baik.

8. Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

9. Meskipun menorehkan sejumlah prestasi, pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I hanya mampu bertahan selama dua tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno pada 1955.

Hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan kabinet, termasuk:

- Konflik antaran PNI dan NU, menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet.
- Terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
- Terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI-AD.
- Maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk.

10. jatuhnya Kabinet Sukiman yang dianggap melanggar batas politik luar negeri Indonesia. Ahmad Soebardjo yang pada saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri melakukan kesepakatan dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran yang dikenal dengan Mutual Security Act. Parlemen kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman karena dianggap telah melanggar politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

11. Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia "pribumi" (dalam arti "non-Tionghoa").

Sistem ekonomi Gerakan Benteng yakni kebijakan yang dicetuskan oleh **Soemitro Djojohadikusumo** yang saat merupakan ekonom. Gerakan Benteng

berlangsung selama tiga tahun (1950-1953) dan berakhir setelah Kabinet Natsir tak lagi berkuasa.

Sistem Ekonomi ini menawarkan 3 bantuan kepada 700 pengusaha peribumi agar bisa berkembang yaitu

- Kredit pinjaman modal
- Hak istimewa impor
- Bantuan pemerintah dan pelatihan

Tapi FYI diujung akhir sistem ini Indonesia malah defisit 3 miliar, tau kenapa kok malah defisit, uang bantuannya malah dipake buat foya foya sama perusahaan, BRUHHH.

## **D. Demokrasi Terpimpin**

### **1. Latar belakang dekrit presiden**

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.

Akhirnya demi keselamatan negara (FYI pada saat itu rapat berkali kali diadakan dan rakyat udah mulai muak) berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.

2. Konsepsi Presiden Soekarno adalah konsep atau gagasan pemikiran Soekarno yang lahir di masa Demokrasi Liberal karena kekecewaan Soekarno terhadap permasalahan partai politik di parlemen yang tidak kunjung terselesaikan dan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan nasional.

Konsepsi ini lahir saat Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya "Menyelamatkan Republik Indonesia" dan diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957. Dalam konsepsi ini, Presiden Soekarno menghendaki dan mendorong penerapan sistem demokrasi yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin.

#### **Isi Konsepsi Presiden**

1) Pembentukan Kabinet Gotong Royong terdiri dari atas semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili partai-partai politik. Kabinet ini juga dikenal dengan istilah "Kabinet Kaki Empat". Kabinet berkaki empat terdiri dari empat partai besar pemenang Pemilu 1955. Partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia.

2) Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Fungsi dari adanya Dewan Nasional ini adalah mendampingi, membantu, memberi kewibawaan kabinet, dan menjadi jembatan antara Pemerintah dan masyarakat. Selain itu tugasnya dewan nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet, diminta atau tanpa diminta oleh Kabinet.

3. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah operasi militer yang dilancarkan Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat (Papua). Operasi ini dimulai pada bulan Desember 1961 dan berakhir pada bulan Agustus 1962.

Awal mula konflik ini ketika kegagalan Indonesia untuk mendapatkan Irian Barat dari Belanda dalam sidang KMB, dan Belanda berencana untuk memerdekakan Irian Barat. Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut:

- Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
- Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto

Strategi Panglima Mandala

- 1) Tahan Infiltrasi (penyusupan) (awal 1962) dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat
- 2) Tahap Eksploitasi (awal 1963) yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
- 3) Tahap Konsolidasi (awal 1964), yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegaskan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Namun operasi ini hanya berlangsung hingga 1962, sebab pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak.

Akhir dari trikora ini adalah perundingan New York (15 Agustus 1962), yang mana isinya penyerahan Irian Barat kepada UNTEA (badan PBB) sebelum diadakan jejak pendapat rakyat Irian untuk merdeka atau ikut Indonesia.

(FYI: dikatakan ada rumor sehari sebelum jejak pendapat rakyat, para pemimpin Irian Barat dipaksa dan disogok untuk memilih ikut Indonesia, allahua'allam)

4. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Pembubaran Konstituante.
- Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Berlakunya UUDS di Indonesia resmi dihentikan setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Soekarno juga mulai menjalankan konsepsi Demokrasi Terpimpin.

5. Alasan pengunduran diri Moh. Hatta pada tahun 1956 karena Moh. Hatta merasa sudah tidak lagi sejalan dengan Presiden Soekarno yang cenderung ke arah kiri dan dekat dengan PKI. Sementara Moh. Hatta sangat anti dengan komunisme dan gerakan kiri. Selain itu, Moh. Hatta juga tidak sependapat dengan Ir. Soekarno yang ingin menjadi pemimpin tunggal dengan memberlakukan Demokrasi Terpimpin. Perbedaan

paham inilah yang mendorong Moh. Hatta mundur dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1956.

6.



Manipol USDEK adalah akronim dari Manifestasi Politik Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK adalah doktrin politik yang digagas oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Tercetusnya Manipol Usdek berawal dari pidato yang disampaikan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “**Pennumua Kembali Revolusi kita**”.

17 Agustus 1961, Soekarno berpidato yang diberi judul "Resopim" atau Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Melalui Resopim, Soekarno menegaskan perlunya penggalangan semua kekuatan untuk memajukan negara, termasuk

perencanaan pembangunan dan pertumbuhan revolusi.

Setahun kemudian, 17 Agustus 1962, Soekarno kembali berpidato yang diberi tajuk "Tahun Kemenangan". Dalam pidato tersebut, Soekarno memberi pedoman kepada masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah di tahun yang akan datang. Rakyat Indonesia wajib untuk terus bersatu padu dan bergotong royong sembari memegang teguh Manipol Usdek (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

#### ISI USDEK:

- 1) Sosialisme Indonesia adalah ide tentang tatanan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
- 2) Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang di mana semua keputusan berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno saat itu.
- 3) Sistem ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ekonomi terpimpin ini, pemerintah pusat berkewenangan penuh dalam mengatur perekonomian negaranya.
- 4) Kepribadian bangsa Indonesia terdapat dalam Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia ini

diyakini kebaikan dan kebenarannya.

7. 7 Januari, di tahun 1965, Presiden Soekarno sempat menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasan utama yang mendasari keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena saat itu Malaysia diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Ketidak sukaan Indonesia terhadap Malaysia karena Malaysia berencana membangun negara federasi yang memungkinkan terjadinya neo kolonialisme bangsa barat terutama Inggris.

8. Penerapan politik bebas-aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal.

Sifat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional, sebagai berikut:

- 1) Pengembalian Irian Barat
- 2) Konfrontasi dengan Malaysia

9. Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi kekuatan baru yang tumbuh di dunia ini. Politik mercusuar ini pernah dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1957 untuk politik luar negeri.

Hasil dari proyek mercusuar adalah:

- 1) memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade Tokyo
- 2) Membangun gedung CONEFU (atau sekarang adalah gedung DPR, MPR, DPD Jakarta)
- 3) Membangun Stadion Gora Bung Karno
- 4) Hotel Indonesia
- 5) Jembatan Semanggi
- 6) Monas
- 7) Pusat Pertokoan Sarinah

## **E. Jaman ORBA**

1. Jawabannya sama no 7 bagian A

2. Tri Tuntutan Rakyat (disingkat Tritura) adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:

- 1) Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
- 2) Perombakan kabinet Dwikora
- 3) Turunkan harga pangan

(singkatnya tuntutan ini keluar setelah terjadinya G30SPKI ygy)

3. Nawaksara adalah sebuah judul pidato yang dilakukan Sukarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai pertanggungjawabannya atas sikapnya dalam menghadapi Gerakan 30 September.

Hal yang dikemukakan dalam Nawaksara cenderung memberi amanat, bukan pertanggungjawaban sebagaimana diminta oleh MPRS. Dalam Nawaksara juga sama sekali tidak disinggung masalah G30S, sehingga MPRS mengirim nota kepada presiden agar melengkapi pertanggungjawabannya. Khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya G30S, beserta epilognya, dan kemunduran ekonomi serta akhlak. Nota ini dikirim oleh pimpinan MPRS pada 22 Oktober 1966.

Pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS, dan sebaliknya MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai presiden seumur hidup, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.

4. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi konflik seperti Irian Barat (Trikora) dan Ganyang Malaysia (Dwikora) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.

Hal ini menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari Rusia maupun RRC. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu. Penolakan ini meruapkan latar belakang kenapa terjadinya G30SPKI,

Setelah G30SPKI Angkatan Darat dengan Supersemar akhirnya membubarkan PKI dan ormas-ormasnya terutama di antaranya dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia dan SOBSI yang dituduhkan merupakan unsur Angkatan Kelima.

5. Tindakan Letjen Soeharto setelah menerima Supersemar:

- 1) melakukan pemberantasan pada pihak yang diduga terlibat Gerakan 30 September
- 2) membubarkan PKI.
- 3) mengamankan 15 menteri pada Kabinet Dwikora, yang diduga terlibat Gerakan 30 September,
- 4) menyusun anggota baru DPR-GR dengan menyingkirkan anggota yang berasal dari PKI.
- 5) melakukan pengendalian terhadap media masa
- 6) membentuk Kabinet Ampera I, dengan Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera.
- 7) kemudian pada 12 Maret 1967, menggulingkan Presiden Soekarno dan dipilih oleh MPRS sebagai presiden yang baru.

6. Ada tiga jenderal yang datang menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor pada 11 Maret 1966 berhasil meyakinkan Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Ketiga jenderal itu adalah

- Brigjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran),
- Brigjen M Jusuf (Menteri Perindustrian), dan
- Pangdam V Jaya Brigjen Amirmachmud.

7. Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Trilogi pembangunan terdiri dari 3:

- 1) Stabilitas Nasional yang dinamis
- 2) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan
- 3) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

8. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1985 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka.

Setelah dikeluarkannya kebijakan ini, organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Menurut NU, mereka menerima Pancasila karena asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam.

Muhammadiyah juga menyatakan tidak masalah menerima Pancasila karena pemimpin-pemimpin Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakkir, dan Kasman Singodimedjo turut serta dalam perumusan Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

akibat penerapan asas tunggal, aktivis-aktivis Muslim yang menginginkan negara Islam dijejalkan ke penjara atau harus melarikan diri ke pengasingan. (nice move dari pak soeharto untuk mencegah pemberontakan untuk pembentukan negara islam).

SEKIAN SEMOGA BERMANFAAT

~Bot Lobster